BAB III

NAHDLATUL ULAMA DIDALAM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

A. Situasi Kepartaian Islam Di Indonesia.

Dalam membahas situasi kepartaian Islam di Indonesia ini, pembahasan masalahnya dibagi dalam beberapa anak sub yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu :

1. Partai-partai Islam yang masih hidup menjelang lahirnya partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Hubungan antara partai Islam.
3. Hubungan antara partai-partai Islam dengan partai politik yang lain.

1.1. Partai-partai Islam yang masih hidup menjelang lahirnya Partai Persatuan Pembangunan.

Untuk menciptakan stabilitas nasional demi tegaknya rasa solidaritas yang mampu menghasilkan ketenangan dalam masyarakat, maka di masa orde baru adanya penyederhanaan partai adalah merupakan satu aspek pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah orde baru. Namun begitu bukan berarti kesemua partai Islam yang ada itu hilang sama sekali; ini terbukti masih adanya partai-partai Islam yang masih dapat mempertahankan diri, dan masih dianggap hidup sebagai partai yang mampu dan dapat menampung aspirasi uumat Islam.

Adapun partai-partai Islam yang dianggap masih hidup dan mampu serta dapat menampung aspirasi politik uumat Islam adalah Nahdlatul Ulama, partai Syarikat Islam Indonesia dan partai Tarbiyah Islam. Sedangkan yang belum tergabung dalam partai-partai Islam yang sudah ada tersebut adalah 9 organisasi Islam yaitu : Muhammadiyah, Wanita Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HSBI, Al Washilah, Persatuan Islam Nahdotul Waton, Matlatul Anwar, Syarikat Nelayan Islam Indonesia, Persatuan Buruh Islam Merdeka dan Persatuan uumat Islam.[1] Karena kesembilan organisasi Islam tersebut belum tergabung dalam wadah yang sudah ada, maka pertama kali presiden menurunkan SK No. 70 tahun 1968,[2] sehingga lahirlah Parmusi (partai Muslimin Indonesia). Lahirnya partai ini sudah barang tentu adanya SK tersebut dan guna dapat menampung kesembilan organisasi Islam di atas.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kesemua partai atau organisasi Islam yang telah disebutkan itu adalah hidup di masa orde baru. Dan tentunya sebelum ada undang-undang no. 3 tahun 1975.[3] yang mengatur parpol dan golkar. Walau nanti di akhir perjalanannya mereka semua tergabung dalam wadah partai Persatuan Pembangunan.

1.2. Hubungan antara partai Islam.

Partai-partai Islam yang masih hidup menjelang lahirnya Partai Persatuan Pembangunan(PPP), pada umumnya mempunyai sejarah hidup yang berbeda, mempunyai cirikhas, tokoh dan watak yang tersendiri dimana satu sama lain berlainan.[4] Karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, maka tentunya mereka juga mempunyai program dan orientasi perjuangan serta tujuan yang belum tentu sama. Dalam hal ini meskipun mereka memiliki identitas yang sama yaitu bernaung dibawah simbul Islam,

---

[1]Drs. Umaidi Radi MA, Strategi PPP, Pn. Integrita,Press, Jakarta, Cet Pertama, 1984, hal. 53.

[2]Ibid, hal. 53.

[3]Ibid, hal. 133.

[4]H.A. Basit Adnan, Ada Apa Di PPP ?, CV Mayasari, Sala, Cet I, 1982, hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dalam hal persaingan politik dan perebutan kekuasaan mereka juga saling bersaing dan bahkan terkadang melupakan kesamaan ideologi, sehingga terlihat juga persaingan yang kurang sehat.

Persaingan dan usaha-usaha yang dilakukan sebagai mana uraian di atas, itu semua mereka lakukan dalam rangka perebutan kekuasaan politik semata. Terlepas dari itu mereka juga bersatu dalam rangka memperjuangkan nasib dan aspirasi umat Islam, apabila merasa uumat Islam dirugikan.

Demikianlah hubungan antara partai-partai Islam menjelang lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya mereka tidak perlu menciptakan saingan politik yang kurang sehat. Sebab sebenarnya landasan ideologi Islamlah yang akan mampu menempatkan posisi partai Islam dengan kondisi yang lebih matang.

I.3. Hubungan antara partai Islam dengan partai politik yang lain.

Karena di negara kita adalah negara demokrasi, maka tentunya sebagai partai politik yang hidup di negara ini seharusnya mempunyai orientasi masa depan demi kemaslahatan dan kemakmuran bangsa.[5] Sebagaimana yang telah menjadi harapan bagi pemerintah kikitaislamwajarlah wajarlah kalau hubungan antara partai Islam dengan partai yg lain bertolak demi kepentingan bangsa dan negara atau lebih jelasnya adalah demi kepentingan nasional. Adapun di sisi lain adanya persaingan ideologi dan persaingan politik demi merebut kekuasaan dalam negeri memang selalu muncul selama karakter

---

[5]Alfian, Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia, Pn. Gramedia, Jakarta, Cet V, 1986, hal. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia berbeda dan memiliki rasa ego yang tinggi.

Demikianlah hubungan antara partai Islam dengan partai yang lain di masa pemerintahan orde baru menjelang lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana titik temu hubungan antara partai Islam dengan partai yang lain bertumpu pada kepentingan nasional.

B. Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah merupakan produk dari orde baru karena ia lahir di masa orde baru ini. Oerde baru adalah pengganti pemerintahan orde lama yang tentunya memiliki orientasi tujuan serta jangkauan wawasan yang luas. Sebagai salah satu bukti orientasinya yang menonjol di awal berdirinya orde baru tersebut adalah adanya penyederhanaan partai politik ; dimana akhirnya ide ini dapat terwujud dan terlaksana sehingga terciptalah dua partai politik dan satu golongan peserta pemilihan umum yang dianggap syah dalam mewakili aspirasi politik rakyat Indonesia ; ini sesuai dengan undang-undang no. 3 tahun 1975. Mereka itu adalah :

- Partai Persatuan Pembangunan,
- Partai Demokrasi Indobesia dan
- Golongan Karya.[6]

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam sub ini akan dikhususkan pembahasannya tentang berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di dalamnya menyangkut masalah :

1. Latar Belakang
2. Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan
3. Tujuannya.

---

[6]Drs. Umaidi Radi MA, Op. cit. hal. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.1. Latar belakangnya.

Dengan pengalaman selama masa Orla baik itu di masa demokrasi liberal atau pun di masa demokrasi terpimpin masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah politik tidak pernah mendapatkan hasil yang positif. Kegagalan itu menurut hemat penulis disebabkan adanya dua faktor yang penting yaitu :

a. Mengutamakan ikatan primordial (suku, agama atau aliran) sedangkan tanggung jawab nasional banyak yang ditinggalkan.
b. Konflik-konflik dilumpuhkan sama sekali, sehingga konsensus kehilangan artinya yang hakiki akibat tangan besi atau kediktatoran Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia.

Dengan adanya ikatan primordial dan lumpuhnya konflik-konflik itu berati orde lama memberikan peluang emas untuk tumbuhnya banyak partai asalkan mau mendukung semua ide Soekarno. Padahal adanya sistem banyak partai itu tentunya akan memberikan kesempatan bagi terciptanya persaingan dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat yang didasari oleh ideologi dan aliran. Akibatnya partai-partai tidak sempat merencanakan atau memprogramkan pembangunan secara bersama dan sistematis.[7]

Pada masa orde baru pemerintah mengambil keputusan bahwa untuk menyelamatkan negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mengisi pembangunan ini adalah tidak ada jalan lain kecuali adanya stabilitas nasional. Stabilitas nasional akan

---

[7] Ibid, hal. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil jika mampu partai-partai yang jumlahnya banyak itu disederhanakan. Dahulu partai- partai peserta pemilu I berjumlah 28,[8] pada pemilu II menyempit menjadi 10[9] dan pada pemilu yang keIII hingga dewasa ini partai ini menjadi menjadi 2 dan 1 golongan peserta pemilu,[10] yaitu partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa lahirnya Partai Persatuan Pembangunan itu dilatar belakangi oleh adanya ide penyederhanaan partai dari pemerintah orde baru.

2.1. Terbentuk Partai Persatuan Pembangunan.

Faktor-faktor yang menyebabkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbentuk antara lain adalah :

a. Perkembangan politik.

Kelompok nasional telah bermusyawarah dan sudah memastikan diri akan segera mengumumkan penggabungan dalam suatu fusi yang terdiri dari PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO, Partai Katholik menjadi satu partai politik yang baru yaitu partai Demokrasi Indonesia. Penggabungan atau fusi mereka secara resmi lahir pada tanggal 10 Januari 1973.[11] Dengan demikian sebagai pertimbangan politik kelompok spiri -

---

[8]Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 121.

[9]Ibid, hal. 167.

[10]Ibid, hal. 172.

[11]Daniel Dhakidai, Pemilihan Umum Di Indonesia - Saksi Pasang Naik Dan Surut Partai Politik, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 199-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tual atau partai-partai Islam yang ada pada waktu itu jika tidak juga segera menggabungkan diri atau berfusi maka mereka pasti akan kehilangan eksistensinya.

b. Pertimbangan agama.

Islam menganjurkan persatuan. Namun secara realitas uumat Islam (khususnya di Indonesia) hampir tidak pernah menunjukkan persatuan dan kesatuan. Meskipun banyak tokoh-tokoh Islam yang menganjurkan (baik lewat buku-buku majalah-majalah ataupun melalui pidato-pidato mereka) supaya uumat Islam bersatu dan menyatu, tapi hasilnya tidak pernah membawa kenyataan. Bukan itu saja bahwa Allah pun memerintahkan supaya uumat Islam harus bersatu. Hal ini terbukti dalam firmanNya yang berbunyi :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ...

(آل عمران : ١٠٣)

Artinya :

" Berpegang teguhlah kamu dengan tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai ".[12]

Itu pun belum juga membawa hasil yang positif. Nampaknya di negara Indonesia ini semangat persatuan Islam baru timbul setelah diadakannya pemilihan umum yang kedua pada tanggal 3 Juli 1971. Meskipun rasa solidaritas itu kurang kuat namun paling tidak dapat menimbulkan kepercayaan tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan tersebut. Akhirnya dengan pertimba -

---

[12]Departemen Agama RI, Al Qur-an Dan Terjemahnya, PT Bumi Restu, Jakarta, 1978, hal. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan agama, maka pada tanggal 13 Perbruari '73 para politisi dari 4 partai Islam yang ada melahirkan sebuah partai politik Islam yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[13]

Partai baru ini merupakan hasil fusi atau penggabungan dari 4 partai Islam yang masih ada pada waktu itu. Keempat partai Islam itu adalah partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia dan partai Terbigah Islam.

3.1. Tujuannya.

Partai persatuan pembangunan yang terkenal sebagai kelompok spiritual, yang lahir akibat adanya peraturan tentang penyederhanaan partai-partai oleh presiden Soeharto dan diperkuat adanya undang-undang nomor 3 tahun 1975 yang mengatur partai politik dan golongan karya adalah merupakan salah satu kelompok fusi yang berorientasi sama, yaitu dibawah naungan Islam. Adapun tujuan lahirnya partai ini adalah tentunya untuk menyalurkan dan menampung serta memperjuangkan aspirasi politik ummat Islam.

C. <u>Posisi Dan Fungsi NU Dalam PPP</u>.

1. Kedudukan NU dalam Partai Persatuan Pembangunan.

Karena PPP adalah merupakan fusi dari 4 partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti), maka secara otomatis keanggotaan ke 4 partai tersebut menjadi anggota PPP. Dengan melalui dewan musyawarah nasional PPP, tepatnya tahun 1975. partai ini berhasil menyusun dan menetapkan AD /ART yang sekaligus merupakan konstitusi partai dan

---

[13] Daniel Dhakidai, <u>Op. cit</u>, hal. 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai anutan dalam mengatur dan menjalankan kehidupan PPP selanjutnya.[14]

Kalau kita perhatikan struktur organisasi maupun komposisi personalia yang menempati posisi-posisi yang telah tersedia, nampak sekali betapa struktur tersebut berusaha memadukan antara struktur yang dimiliki ke 4 partai yang berfusi, begitu juga yang menempati posisi-posisi penting dalam sturktur tersebut diatur menurut hasil kesepakatan mereka. Dalam hal ini NU sebagai partai yang terbesar memperoleh kedudukan penting, seperti presiden partai oleh Dr. K.H. Idham Cholid, Wakil ketua Umum pimpinan pusat H. Mudin Lubis, ketua umum majlis pertimbangan pusat K.H. Masyskur, Rois 'Am Majlis Syuro K.H. Bisri Syamsuri dan lain-lain. Kemudian disusul Parmusi sebagai partai kedua terbesar dan yang terakhir adalah PSII dan Perti.[15]

2. Fungsi NU Dalam PPP.

Dengan melalui proses yang rumit lahirlah PPP yang dipilih menjadi nama dari fusi 4 partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti). Sebenarnya pengaruh NU dalam proses pembentukan PPP cukup besar ; sebagaimana tanda gambar ka' bah adalah atas usul K.H. Bisri Syamsuri.[16] Rois 'Am syuriyah PB NU, begitu juga dapat dilihat dalam struktur organisasinya sampai pada person-personnya banyak diduduki oleh orang-orang NU. Sehing-

---

[14] Drs. Umaidi Radi MA, Op. cit, hal. 97-98.

[15] Ibid, hal. 91-96.

[16] Slamet Effendi Yusuf, Dinamika Kaum Santri, CV Rajawali, Jakarta, Edisi Pertama, 1983, hal. 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ga dapat dikatakan bahwa fungsi kepemimpinan NU dalam PPP menonjol dan tidak mustahil kalau orang orang NU ikut menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan-persoalan penting seperti RUU Perkawinan tahun 1973,[17] dan menghadapi SU MPR tahun 1978.[18] Namun sayang sejak meninggalnya K.H. Bisri Syamsuri ; mulai tampak kepemimpinan NU dalam PPP secara fungsional berkurang.[19] Apalagi ketika ketua umum PPP DR.H.J. Naro SH . melakukan upaya-upaya untuk memperbesar peranan - di luar NU, terutama MI. Akhirnya perjuangan politik NU melalui PPP makin menelusuri jalur- jalur yang menyempit, sedang untuk mengetahui perkembangan NU dalam PPP selanjutnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

3. Perkembangan NU dalam PPP.

Sebenarnya kekompakan kepemimpinan PPP pada tahun-tahun pertama kelahirannya telah menghembuskan angin segar bagi masa depan Ummat Islam Indonesia dalam percaturan politik di negeri ini. Hal ini terjadi sampai setelah sidang MPR Tahun - 1973. Mereka tampil di panggung politik secara kompak dan cukup memuaskan uumat Islam hingga pada pembahasan penting tentang RUU Perkawinan se - bagaimana tersebut. RUU Perkawinan di DPR RI ini nampaknya merupakan ujian pertama terhadap kekompakan PPP dan dapat diselesaikan menjadi undang-undang yang sedikit banyak lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum perkawinan

---

[17] Drs. Uamidi Radi MA, Op. cit, hal. 115.

[18] Ibid, hal. 145.

[19] Slamet Effendi Yusuf, Op. cit, hal. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam.

Aadanya kesadaran bahwa PPP adalah penyegar aspirasi dan alat perjuangan ummat Islam, adanya kekuatan dan semangat untuk memupuk ukhuwwah Islamiyah serta hasrat guna lebih meningkatkan pengabdian terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian kekompakan PPP terus berjalan dengan mengindahkan aturan politik yang sehat dan asas musyawarah tentunya. Kekompakan PPP tersebut berlanggung hingga ke konsensus Munas tahun 1975.[20] yang pada saat itu mereka sepakati suatu patokan sebagai landasan guna membagi hasil pemilu tahun 1977 dengan rasio perbandingan menurut hasil pemilu tahun 1971.[21] Dengan adanya konsensus ini maka PPP tampil ke gelanggang pemilu th 1977 dengan kekuatan yang potensial dan kompak. Sehingga hasilnyapun dapat terlihat PPP dapat menambah hasil pemilu dengan 5 kursi DPR pusat.

Pada sidang umum MPR tahun 1978 juga masih terlihat kompak dalam tubuh PPP. Hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh tokoh figur K.H. Bisjri Sjamsuri sebagai ulama yang memilki kharisma tinggi. Sehingga kehadiran beliau mempunyai nilai tersendiri di kalangan PPP dan sekaligus menjauhkan ketetakan-keretakan yang ada dalam tubuh PPP.

Setelah wafatnya K.H. Bisjri Sjansuri,maka keretakan dalam tubuh PPP mulai nampak. Dan ini berarti konsep untuk berfusi tersebut bukanlah datang dari kepentingan intern partai-partai Islam; sehingga strateginya jalan sendiri-sendiri. Kere-

---

[20] Ibid, hal. 63.

[21] Drs. M. Rusli Karim, Op. cit, hal. 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takan mulai timbul dan terasa berawal dari pembahasan mengenai RUU pemilu dan sederet masalah-masalah lain yang mulai sering dipersengketakan dalam polemik di antara sesama tokoh PPP.Ternyata kerapuhan itu semakin jelas saat berlangsungnya pengalonan keanggotaan DPR untuk pemilu tahun 1982[22]antara MI dan NU tidak sejalan. MI yang dipelopori Soedardji menghendaki perimbangan kursi didasarkan atas hasil pemilu tahun 1955; padahal sebelumnya (pada kunsensus Munas PPP 1975) sudah mereka sepakati bahwa perimbangan itu atas dasar perimbangan hasil pemilu tahun 1971. Demikian terus merembet sampai pada puncaknya yaitu tentang daftar calon yang tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu sesama anggauta. Akibatnya NU dikesampingkan oleh MI sebab ketua umum DPP PPP Naro dan kawan-kawan dari unsur MI berhasil menyampaikan urutan daftar calon sementara keanggautaan DPR di kediaman Mendagri Amir Machmud dan sudah barang tentu daftar calon tersebut banyak menggeser tokoh-tokoh NU. Namun begitu NU tidak tinggal diam. Dia memprotes agar DPP PPP secepatnya menyelenggarakan rapat untuk membicarakan masalah tersebut. Tetapi sayang LPU menganggap hal tersebut sudah syah. Dan akhirnya pertikaian mengimbas pada intern NU sendiri.[23] Akibatnya tidak dapat dihindarkan lagi, NUmengalami kegoncangan di dalam.

Gambaran tersebut di atas tampaknya disebabkan karena tertutupnya pintu musyawarah dan tiadanya kepemimipinan yang menyadari arti tanggung

---

[22]H.A. Basit Adnan, Op. cit, hal. 48.
[23]Slamet Effendi Yusuf, Op. cit, hal. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab kesatuan dalam persatuan. Sampai munculnya antara pro dan kontra mengenai keberadaan NU dalam PPP. Guna menghadapi situasi yang semakin kacau, maka PB syuriyah NU mengadakan rapat dan diambillah suatu keputusan bahwa PB Syuriah NU akan mempertimbangkan kedudukannya dalam PPP, apabila azas musyawarah, solidaritas intern dan prinsip-prinsip organisasinlainnya tetap tidak ditegakkan dan agar kemelut yang melanda dapat diselesaikan dengan tuntas.[24]

Uraian tersebut di atas dari kekompakan NU dengan PPP sampai terjadi pergeseran tata nilai yang berkembang menjadi perpecahan ; merupakan bukti kuat dari perjalanan proses pemantapan kembali ke bentuk jam'iyah atau yang lebih dikenal dengan kembali ke khittah tahun 1926.

Demikianlah sekilas mengenai posisi dan fungsi NU dalam partai persatuan pembangunan (baik itu sebagai penentu dasar sekaligus pelaksana operasional di awal perjalanannya dalam PPP maupun sampai tergeserna partai ini dari PPP).

-oOo-

---

[24]Choirul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan NU, PT Jatayu, Sala, Cet I, 1985, hal. 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id